

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang paling utama dan selalu penting untuk dibenahi sejalan dengan dinamika zaman. Penjaminan mutu menjadi konsentrasi bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dan keputusan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan amrtabat manusia Indonesia. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 pasal 91 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)¹.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh

¹ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 283-284.

sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Dengan demikian, penting bagi setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arwan Rifai yang menyatakan bahwa penjaminan mutu internal dapat digunakan untuk meningkatkan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang terdiri dari penetapan standar mutu acuan, penetapan prosedur operasional baku, pelaksanaan pemenuhan beserta pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar mutu².

Sekolah beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggung jawab dalam penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan di sekolah tidak bisa berjalan utuh tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah tersebut. Peningkatan mutu secara utuh dalam pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen sekolah untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan. Kerjasama sebagai proses mencapai tujuan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ (الصف : ع)

Artinya : *Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh³.*

² Arwan Rifai, *Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan Melalui Model Penjaminan Mutu Internal SMK*, 2015, Jurnal Pendidikan, Volume VI No: 01, April 2015

³ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an : Miracle The Reference, cet. 1*, (Bandung : PT Sygma Publishing, 2010), hlm. 1099.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mengatur diri mereka bersaf-saf pada waktu perang, sehingga di antara mereka itu tidak ada lagi celah-celah, seakan mereka adalah bangunan yang bagian-bagiannya berikatan, sehingga bagai satu potong bangunan yang dituang. Dengan cara inilah pasukan bergerak di masa kini.

Rahasiannya ialah apabila mereka bersaf-saf seperti itu, maka kekuatan moral mereka akan bertambah, mereka akan berlomba dalam menyerang dan menikam, dalam bergerak dan lari, dan lain-lainnya yang menimbulkan rasa takut dan kaget dalam jiwa musuh, di samping perencanaan yang baik dan pelaksanaan kerja secara cermat dan baik. Oleh sebab itu, maka Allah memerintahkan kepada kita agar meratakan saf-saf di dalam salat, dan seorang musalli tidak boleh duduk di saf belakang kecuali jika yang depan telah penuh.

Demikianlah umat-umat masa ini dipelihara dengan kedisiplinan dalam setiap pekerjaan, makan, tidur, olahraga, dan pendidikan anak-anaknya, tanpa memusatkan satu pekerjaan di atas pekerjaan lain. Keseriusan mempunyai waktu sendiri, olahraga mempunyai waktu yang lain, dan tidur juga mempunyai waktu tersendiri pula. Oleh karena itu, tidak terdapat kelelahan dan kesenjangan dalam pekerjaan dan tidak terdapat pula pengabdian⁴.

Hal ini memang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW pada masa berdakwah di Madinah, saat surat ini diturunkan. Pengokohan organisasi dan kejama'ahan adalah titik tekan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, berbeda dengan titik tekan dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekkah yang fokus pada pengokohan aqidah dan ruhiyah ummat Islam masa itu. Dalam surat ini, terdapat lima konsep besar yang harus ada untuk mewujudkan organisasi yang kokoh, yaitu kesesuaian konsep dan pelaksanaan dalam organisasi, soliditas tim,

⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hlm. 130.

ketepatan mengukur dan mengetahui kekuatan dan tantangan, konsep kesungguhan dalam bekerja dan berjuang, serta memiliki kader yang militan (kader yang solid)⁵.

Sejalan dengan ayat tersebut, M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan kecaman. Sementara ulama memahaminya sebagai kecaman kepada orang-orang munafik, bukan orang-orang mukmin, karena sifat orang-orang mukmin sedemikian tinggi sehingga mereka tidak perlu dikecam. Pendapat ini hemat penulis benar, tetapi kita juga tidak dapat mengatakan bahwa yang dikecam itu bukan hanya orang-orang munafik, tetapi juga yang imannya masih lemah, walaupun mereka bukan munafik. Karena itu ayat di atas menggunakan kata *alladzina amanu* bukan *al-mu'minun*. Melalui ayat-ayat inilah mereka dididik sehingga akhirnya mencapai peringkat keimanan yang tinggi (mukminun).

Sayyid Quthub mengomentari ketiga ayat di atas dengan menyatakan, bahwa di sana terlihat penyatuan akhlak pribadi dengan kebutuhan masyarakat, di bawah naungan akidah keagamaan. Kedua ayat pertama (ayat 2-3) mengandung sanksi dan Allah SWT serta kecaman terhadap orang beriman yang mengucapkan apa yang mereka tidak kerjakan. Ini menggambarkan sisi pokok dari kepribadian seorang muslim, yakni kebenaran dan istiqomah/konsistensi serta kelurusan sikap, dan bahwa batinnya sama dengan lahirnya, pengamalannya sesuai dengan ucapannya secara mutlak dan dalam batas yang sangat jauh yaitu persoalan peperangan yang akan ditanggung dalam ayat berikutnya. Ciri kepribadian muslim ini sangat ditekankan oleh al-Qur'an, sunnah pun berulang-ulang menambahkan penekanannya.⁶

⁵ Rofi Munawar, *Manajemen Organisasi Dalam Al-Qur'an*, Artikel, wanvisioner.blogspot.com, 2009

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 192.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, untuk mewujudkan organisasi yang kokoh, dibutuhkan peningkatan manajemen mutu. Pemerintah telah mengembangkan sistem peningkatan penjaminan mutu dalam pendidikan terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang berjalan di satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan, sedangkan SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan⁷.

SPMI menjadikan sekolah sebagai pelaku utama atau ujung tombak penjaminan mutu pendidikan. SPMI menciptakan sekolah sebagai organisasi pembelajar dan menciptakan pentingnya budaya mutu. Mutu tidak lagi diposisikan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan bahkan sebagai gaya hidup. Mutu tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi menjadi urusan setiap orang⁸. Setiap warga sekolah diharapkan berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah⁹.

SPMI meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sejalan dengan hal tersebut, SPMI dapat mensinergi program kegiatan yang lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Silvy Eka Andiarini, dkk., yang menyatakan bahwa Implementasi program PPK melalui kegiatan

⁷ Kemdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 4.

⁸ Idris Apandi, *Sekolah Pelaku Utama Penjaminan Mutu Pendidikan*, Kompasiana. Diakses tanggal 2 Maret 2019 pukul 13:20 wib.

⁹ Kemdikbud, *Panduan Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Sekolah Model SPMI Tahun 2018*, (Semarang: LPMP Jawa Tengah, 2018), hlm. 2.

pembiasaan dalam meningkatkan mutu sekolah dimulai dengan melakukan perencanaan kegiatan melalui SPMI dan penyusunan SKL yang akan berdampak pada perubahan kurikulum, RPP, jadwal pelajaran, dan tersusunnya SOP pelaksana¹⁰.

Dalam implementasinya, SPMI mengikuti siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan SNP dengan menggunakan dokumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS), (b) pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), (c) pelaksanaan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan maupun proses pembelajaran, (d) *monitoring* dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan, (e) penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi¹¹.

Sistem penjaminan mutu berdasarkan siklus di atas, dalam pelaksanaannya dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan, serta ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan kemudian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model. Sekolah model tersebut dimaksudkan sebagai gambaran langsung atau contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola

¹⁰ Silvy Eka Andiarini, dkk. *Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah*, JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Volume 1 Nomor 2 Juni 2018,

¹¹ Permendikbud No 28 Tahun 2016 *Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.

pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga mencapai ke seluruh satuan pendidikan.

Sekolah Model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh LPMP untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum atau yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penentuan sekolah ini bertujuan untuk mengetahui progres sekolah yang bersangkutan kedepannya apakah sekolah akan mengalami peningkatan dari sebelumnya¹². Dalam penentuan sekolah yang akan diutus, selanjutnya dibina pada program sekolah model yaitu melalui rapat koordinasi sekolah model yang dilaksanakan di LPMP dengan mengundang Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah beserta unsur pimpinannya.

Pada rapat tersebut maka masing-masing utusan dari dinas kabupaten kota yang ada dalam Provinsi Jawa Tengah beserta unsur pimpinannya merekomendasikan sekolah yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai sekolah model. Sekolah yang telah ditetapkan oleh masing-masing Dinas Kabupaten Kota beserta unsur pimpinannya tersebut di atas, kemudian akan dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sekolah model yang telah terpilih selanjutnya akan menerapkan penjaminan mutu sekolah, sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu ke sekolah imbas atau bahkan ke seluruh satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu, sekolah diawasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinasi Dit Tendik. Tujuan pengawasan ini adalah agar pelaksanaan

¹² Jamaludin dan Sopiah, *Desain Sekolah Model: Studi Penjaminan Mutu Pendidikan*, IJER, 2 (2), 2017, 99 - 107

pendidikan berlangsung sesuai standar, norma, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sekolah model telah difasilitasi dalam penerapan SPMI melalui bimbingan teknis (bintek) dan pendampingan implementasi di sekolah oleh fasilitator nasional/fasilitator daerah. Sasaran kegiatan SPMI adalah warga sekolah model beserta sekolah imbasnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bangsri merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah kejuruan negeri di Kabupaten Jepara yang terpilih menjadi sekolah model.

Sekolah tersebut merupakan sekolah baru dengan SK pendirian tahun 2008, namun pada tahun 2010 baru menerima pendaftaran peserta didik baru. Sebelum ditunjuk sebagai sekolah model, sekolah tersebut telah terakreditasi B, kemudian pada tahun 2017 baru ditunjuk sebagai sekolah model untuk mengimplementasikan SPMI.

SMK Negeri 1 Bangsri memiliki visi “Terwujudnya SMK yang Mampu Menciptakan Tamatan yang Cerdas, Produktif, Kompetitif, Bertakwa, serta Berakhlak Mulia”. Misi sekolah tersebut adalah: (a) Melaksanakan pembelajaran yang bertaraf internasional berbasis keunggulan seni dan budaya, (b) Menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia industri dan Stakeholder, (c) Mewujudkan Wawasan Wiyata Mandala dan meningkatkan citra sekolah Menengah kejuruan, (d) Menghasilkan Tamatan yang cerdas, produktif, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Untuk mewujudkan visi dan misi, tersebut sekolah tersebut telah melakukan upaya peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengimplementasikan SPMI. Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan ketua

penanggung jawab SPMI di SMK Negeri 1 Bangsri, bahwa pada tahun 2018 sekolah tersebut telah mendapat surat undangan dari Kemendikbud Nomor 005/2700 untuk mengikuti diklat pendampingan sekolah model.

SMK N 1 Bangsri dengan adanya diklat tersebut kemudian melaksanakan SPMI. Selain dituntut untuk meningkatkan mutu internal, sekolah tersebut harus mampu memberikan contoh kepada 5 (lima) sekolah imbas. Sekolah imbas terdiri dari 5 sekolah yang lokasinya berada pada satu koordinator wilayah tersebut. Sekolah imbas tersebut merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh suatu yayasan, komite atau lembaga tertentu. Selain dituntut untuk meningkatkan mutu internal, sekolah tersebut harus mampu memberikan contoh kepada 5 (lima) sekolah imbas.

SMK N 1 Bangsri telah melakukan pemetaan mutu melalui dokumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang secara serentak dan seragam disosialisasikan oleh LPMP lewat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kabupaten Jepara. Dari data pengisian EDS dapat diketahui bahwa selama 3 tahun terakhir hasil EDS terhadap pemenuhan SNP secara prosentase pada tiap standar mengalami kenaikan, meskipun masih berada di bawah SNP.

Hasil penilaian EDS kemudian digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan mutu yaitu Rencana Kerja Sekolah (RKS). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tim Pengembang Sekolah (TPS) diperoleh informasi bahwa dalam menyusun RKS, semua tim pengembang sekolah telah memahami prosedur dan teknik yang jelas dalam penyusunan RKS.

Penerapan SPMI berdampak positif pada kuantitas siswa. Dari data Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), selama 3 tahun terakhir kuantitas siswa semakin meningkat. Jumlah pendaftar siswa yang masuk dua kali lipat jumlah siswa yang telah ditentukan. Selain itu, prestasi siswa di SMK

Negeri 1 Bangsri ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak hanya prestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah, namun juga tingkat nasional.

Pelaksanaan SPMI di SMK Negeri 1 Bangsri, meskipun mengalami kenaikan diberbagai lini kerja, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala tersebut yaitu kurangnya kesadaran guru dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sekolah. Selain itu, adanya beban kerja yang tinggi pada guru menyebabkan tidak adanya kepedulian terhadap program-program sekolah.

Dalam menghadapi kemajuan zaman yang semakin canggih ini, tentunya sekolah harus memiliki kualitas yang mampu berdaya saing baik di kalangan nasional maupun internasional. Meirawan (2010) dalam *quality assurance* telah menjadi syarat penting kualitas pendidikan di era otonomi daerah di Indonesia karena akan memiliki efek positif pada pengembangan sekolah di tingkat regional dan menghasilkan standarisasi kualitas di tingkat nasional. Husaini Usman menambahkan bahwa penjaminan mutu sekolah yang efektif, meliputi seluruh kegiatan yang terencana, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan yang diterapkan dalam manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa seluruh proses telah melalui standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga sasaran mutu sekolah akan terwujud¹³.

Peningkatan mutu pendidikan telah didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah melalui program-programnya, berusaha meningkatkan anggaran pendidikan untuk tunjangan sertifikasi guru-guru, tunjangan tambahan penghasilan (tamsil), dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Selain itu, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya berusaha kembali mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dari tahun ke

¹³ Husaeni Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 428.

tahun melalui berbagai variasi kebijakan yang lebih strategis, seperti kebijakan yang menyangkut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kurikulum 2013, akreditasi sekolah, penyediaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Perbaikan Manajemen Berbasis Sekolah (PMBS), Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dan peningkatan mutu guru melalui diklat pendidikan. Disamping itu dilakukan juga peningkatan mutu pendidikan secara lebih sistematis yaitu dengan cara penerapan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) di tingkat satuan pendidikan.

Usaha-usaha pemerintah tersebut dirasakan belum memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan laporan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berkedudukan di Hongkong¹⁴, sebagaimana dimuat dalam The Jakarta Post (Vol. 19, No. 127: 2001), diungkapkan bahwa sistem pendidikan Indonesia adalah yang terburuk di Asia. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah lebih cenderung bersifat eksternal. Usaha eksternal yang diberikan pemerintah disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Usaha peningkatan mutu pendidikan berasal dari luar sekolah bukan dari sekolah tersebut. Salah satu bentuk SPME adalah lembaga akreditasi dan SMM ISO 9001:2008.

Usaha peningkatan mutu akan lebih efektif bila dilakukan secara internal, yaitu sekolah yang bersangkutan melakukan secara sadar usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan. Usaha sadar tersebut adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di dalam sekolah tersebut, yang disebut dengan SPMI. Dengan program SPMI ini, SMKN 1 Bangsri mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas secara maksimal.

¹⁴ Sebagaimana dimuat dalam The Jakarta Post (Vol.19,No.127:2001)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan guna menjaga fokus penelitian dalam tesis ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana implementasi manajemen sekolah model sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu di SMK Negeri 1 Bangsri Jepara?
- 2) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi manajemen sekolah model sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu di SMK Negeri 1 Bangsri Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian tesis ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui implementasi manajemen sekolah model sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu di SMK Negeri 1 Bangsri Jepara.
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen sekolah model sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu di SMK Negeri 1 Bangsri Jepara?

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Penjelasan manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Secara Teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam implementasi manajemen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) bagi dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak terkait yaitu:

- (a) Kepala Sekolah, pengembangan model penjaminan mutu internal ini dibutuhkan sebagai acuan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk meningkatkan mutu sekolah yang sesuai dengan SNP.
- (b) Bagi Guru dan pemangku kepentingan, pengembangan model penjaminan mutu internal akan memberikan informasi mengenai program-program sekolah yang wajib dilaksanakan untuk meningkatkan mutu sekolah.
- (c) Bagi Tim Pengembang Mutu (TPM), model penjaminan mutu internal ini akan memberikan acuan pelaksanaan SPMI melalui tahap-tahap dan komponen-komponen yang dikembangkan untuk kegiatan penjaminan mutu yang sesuai dengan kebutuhan.
- (d) Peneliti lain, memberikan referensi bagi temuan baru dalam hal penjaminan mutu pendidikan sehingga dapat diteliti lebih lanjut apakah model penjaminan mutu internal ini dapat diterapkan pada lembaga pendidikan yang lain.